



ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KURSUS MENGEMUDI MOBIL TERHADAP PENGGUNA JASA

Analysis of the Responsibilities of Car Driving Course Service Providers to Service Users

Muh Nur Parawansyah¹, Zulkifli Makkawaru², Abd. Haris Hamid²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: karaengtayang09@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tanggung jawab perusahaan yang memberikan administrasi kursus mengemudi kendaraan kepada klien pendukung kursus jika terjadi kecelakaan dan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas klien administrasi jika terjadi kecelakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban perusahaan untuk memberikan layanan kursus mengemudi untuk mendukung klien (siswa belajar) dengan asumsi kecelakaan yang terjadi selama persiapan adalah bahwa pembeli tidak menanggung risiko kerugian properti yang memiliki tempat dengan perusahaan. Jenis kewajiban guru meliputi kewajiban menafkahi klien dan kewajiban terhadap korban jika terjadi kemalangan karena kecelakaan selama persiapan, kewajiban pendidik adalah membayar kerugian kendaraan, misalnya membawanya ke studio atau memotong membayar langsung oleh lembaga yang memberikan manfaat kursus, kewajiban tetap ditanggung oleh guru oleh koperasi spesialis.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Penyedia Jasa Kursus Mengemudi, Pengguna Jasa

ABSTRACT

This exploration plans to find out the type of liability of the establishment giving vehicle driving course administrations to course support clients in case of a mishap, to figure out who is answerable for administration clients in case of a mishap. The result of this research show that the obligation of the establishment to give driving course administrations to support clients (understudies learning) assuming a mishap happens during preparing is that shoppers don't bear the gamble of harm to property having a place with the establishment. The type of the teacher's liability incorporates liability to support clients and obligation to the casualty in case of a misfortune because of a mishap during preparing, the educator's liability is to pay for vehicle harm, for example, taking it to a studio or deducting pay straight by the establishment that gives course benefits, obligation remains borne by the teacher by the specialist co-op.

Keywords: *Responsibilitities, Service Providers, Driving Course, Service Users* ,

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Kemajuan Bisnis di Indonesia saat ini sangat cepat. Ini adalah akibat langsung dari sejumlah besar pintu terbuka bisnis yang muncul seiring berkembangnya permintaan lingkungan. berangkat dari persiapan bisnis di bidang persiapan, sosial, ketat, merek dan berbagai jenis bisnis. Persiapan usaha, baik sebagai tenaga kerja maupun barang, bergerak sesuai dengan keinginan masyarakat sekitar, terus berkembang dari tahun ke tahun. Salah satu praktik bisnis yang semakin tidak terkendali saat ini adalah persiapan kerjasama di bidang bimbingan belajar, baik latihan usaha dalam bidang diklat formal maupun di bidang diklat.

Pelatihan formal yang dimaksud adalah persekolahan yang sering disebut pengajaran sekolah, sebagai

perkembangan derajat sekolah yang dinormalisasi. Tingkat instruksi formal terdiri dari sekolah dasar, pelatihan opsional dan pendidikan lanjutan. Sedangkan persekolahan nonformal adalah pelatihan yang sesuai dengan kepentingan daerah yang keberadaannya dapat diakui dan diciptakan sesuai dengan permintaan daerah yang bersangkutan dengan kepentingan hidupnya dalam mengisi usaha-usaha kemajuan daerah.

Mengingat Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Persekolahan Umum, satuan persekolahan nonformal jelas terdiri dari pendirian, penyiapan yayasan, konsentrasi pada perkumpulan, fokus aksi pembelajaran daerah, dan taklim. jemaat, serta unit edukatif. instruksi yang sebanding. Kursus dan persiapan diadakan bagi individu yang membutuhkan informasi, kemampuan, kemampuan dasar, dan mentalitas untuk

mengembangkan diri, mengembangkan panggilan, pekerjaan, organisasi bebas, serta melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.

Adapun penyelenggaraan persekolahan formal dan nonformal telah diarahkan dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Persekolahan Umum, pemasok dan tambahan satuan persekolahan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau daerah setempat sebagai unsur hukum yang edukatif. Selain itu, dapat dipahami dalam Pasal 53 ayat (3) bahwa bahan ajar yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pedoman non-manfaat dan dapat mengawasi cadangan secara bebas untuk menggerakkan unit pelatihan. Untuk penyelenggaraan persekolahan nonformal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) penyelenggaraan satuan diklat nonformal dilakukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan tambahan daerah setempat.

Pada dasarnya, pelatihan formal yang diselenggarakan oleh otoritas publik atau daerah harus sebagai substansi hukum yang instruktif, namun disadari bahwa setiap elemen yang sah memiliki kualitasnya sendiri. Bagian terbesarnya adalah emas untuk mencari keuntungan. Sementara kualitas pelatihan formal dan non-formal adalah non-manfaat, maka jenis unsur legitimasi yang paling pas adalah jenis pendirian.

Dalam Peraturan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pendirian diatur bahwa: "Badan Usaha dapat melaksanakan kegiatan usaha untuk membantu tercapainya maksud dan tujuan dengan meletakkan suatu substansi usaha atau berpotensi ikut serta dalam unsur usaha".

Di kota Makassar, terdapat 1 (satu) koperasi spesialis kursus sebagai lembaga, yaitu pembentukan organisasi spesialis kursus ALIAH. Lembaga administrasi kursus ALIAH menawarkan berbagai jenis pilihan yang jelas, khususnya kursus PC, bahasa Inggris, persiapan mengemudi kendaraan. Pembentukan organisasi spesialis kursus ini memberikan berbagai jenis kursus yang jelas merupakan kebutuhan daerah setempat untuk membantu latihan sehari-hari dan juga merupakan suplemen untuk pelatihan tradisional daerah setempat.

Dari berbagai jenis kursus yang ditawarkan, ada satu jenis yang jelas menarik perhatian para pembuatnya, khususnya keunggulan kursus mengemudi kendaraan karena salah satu keunggulan kursus semakin dikenal di kalangan masyarakat saat ini. Dengan terselenggaranya kursus mengemudi kendaraan ini, maka masyarakat secara keseluruhan sebagai klien manajerial dapat dalam waktu singkat dan berhasil mengetahui cara mengemudikan kendaraan, yang tentunya dibarengi dengan susunan staf yang disebut tenaga pendidik.

Permintaan peraturan dalam kursus mengemudi kendaraan dimulai dengan pendaftaran yang harus diselesaikan sebelum memulai persiapan sebagai klien bantuan. Sejak awal, pendaftaran diselesaikan dengan menyelesaikan struktur pendaftaran. Dari sisi regulasi perjanjian, struktur pendaftaran sebagai pemahaman persiapan antara pembentukan organisasi spesialis kursus mengemudi kendaraan dan siswa belajar adalah premis komitmen yang mengikat kedua pemain.

Struktur dan brosur pendaftaran kursus menggabungkan kepribadian klien administrasi Kursus yang terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, jurusan, bidang pendidikan, bundel, besaran cicilan biaya pendaftaran yang jelas, dan daftar jenis kendaraan yang pasti. Selain itu, ini juga mencakup berbagai jenis kendaraan yang masuk akal yang membantu pelanggan

memilih, biaya pendaftaran yang disesuaikan dengan jenis kendaraan yang dipilih, dan daftar pilihan waktu perencanaan.

Siswa yang fokus pada hal ini adalah mereka yang belum tahu tentang cara mengemudikan kendaraan dan juga mereka yang ingin mempercepat cara mengemudikan kendaraan. Selain itu, tidak ada kursus yang layak yang ditawarkan oleh pemasok dukungan untuk bertindak sebagai kursus kesejahteraan bagi pemula. Yang lebih perlu diperhatikan adalah potensi kecelakaan yang terjadi pada saat persiapan mengemudi kendaraan. Padahal kendaraan yang digunakan saat persiapan dilengkapi dengan 2 buah rem yang berfungsi sebagai pengatur oleh seorang guru ahli.

Bagaimanapun, itu tidak cukup untuk menjamin kesehatan siswa yang memahami selama persiapan dalam pelaksanaan kelas instruksi mengemudi kendaraan ini, kecelakaan sering terjadi di jalan raya. Kecelakaan yang terjadi pada saat persiapan adalah bertabrakan dengan kendaraan pengguna jalan lain dan hal ini membahayakan kendaraan kursus dan kendaraan pengguna jalan lainnya serta sebaliknya. Dengan adanya musibah yang diakibatkan oleh musibah tersebut, maka muncul persoalan siapa yang bertanggung jawab atas musibah tersebut. Sementara itu, dalam pengaturan kursus antara lembaga penyelenggara kursus mengemudi kendaraan dan siswa belajar, jelas tidak ada pemberitahuan siapa yang mampu dan apa jenis tanggung jawabnya atas musibah tersebut.

Kursus mengemudi kendaraan ini adalah tempat yang sah, jelas bergantung padanya. Peraturan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pendirian, baik dalam hal pengawasan dan pelaksanaan kegiatan usaha pendirian maupun kewajibannya. Jadi dengan asumsi ada musibah yang membuat pihak luar sengsara, untuk keadaan ini klien pendamping (mahasiswa belajar), dilihat dari peraturan pendirian, lembaga yang memberikan administrasi kursus harus mampu.

Sekali lagi, perlu diperhatikan bahwa sehubungan dengan kewajiban, dalam pengaturan kerja antara guru kursus mengemudi kendaraan dan lembaga yang memberikan administrasi kursus, pendidik bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemalangan yang muncul dari kecelakaan selama persiapan.

Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Umum yang menyatakan bahwa: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas bencana yang disebabkan oleh pilihannya sendiri, tetapi juga kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang-orang tersebut. yang memiliki tempat bersamanya. bangsal, atau disampaikan oleh saham. yang sangat dipengaruhi oleh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui jenis tanggung jawab perusahaan yang memberikan administrasi kursus mengemudi kendaraan kepada klien pendukung kursus jika terjadi kecelakaan dan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas klien administrasi jika terjadi kecelakaan.

2. METODE

Jenis eksplorasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplorasi yang sah. Eksplorasi yang sah adalah suatu strategi pemeriksaan yang berupaya menelusuri undang-undang dalam pasal yang asli atau dikatakan telah menelusurinya, melihat bagaimana undang-undang tersebut bekerja di mata masyarakat, kemudian menggunakan teknik-teknik penelitian, jenis-jenis pemeriksaan yang khas. Pemilahan informasi dan pemilahan informasi dilakukan di Yayasan Aliah Course Specialist Organization. Mata air

fundamental data adalah hasil pertemuan dengan Pendirian organisasi Pakar Aliah. Tahap selanjutnya yang digunakan dalam eksplorasi ini terdiri dari: Instrumen hukum esensial, opsional dan tesier. Bergantung pada ide eksplorasi dan materi ujian, semua data yang sesuai akan diuraikan dengan susah payah, dengan bantuan informasi yang dikumpulkan diatur oleh kelas mereka dan diklarifikasi dalam pencarian jawaban untuk pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan strategi penurunan, akhir dari penyelidikan matematis adalah hasil dari eksplorasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tanggung Jawab Yayasan Penyedia Jasa Kursus Mengemudi Mobil Terhadap Pengguna Jasa Apabila Terjadi Kecelakaan Pada Saat Pelatihan

Dalam Pasal 1233 Common Code diatur bahwa: "Setiap komitmen dikandung baik dengan pemahaman atau regulasi". Selain itu, komitmen merupakan premis dari hubungan yang sah yang kemudian bermuara pada keistimewaan dan komitmen masing-masing pihak masuk ke dalam kesepakatan. Kebebasan dan komitmen terkait erat dengan masalah kewajiban. Perkumpulan bertanggung jawab atas semua hasil yang muncul dari kesepakatan yang telah disepakati bersama.

3.1. Hubungan Hukum Antara Yayasan Penyedia Jasa Kursus Mengemudi Mobil Dan Pengguna Jasa Kursus

Hubungan yang sah antara lembaga pemberi kursus mengemudi kendaraan dan klien administrasi (siswa belajar) tergantung pada pemahaman yang didukung oleh kedua pemain sebagai indikasi perjanjian. Segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, khususnya lembaga penyelenggara kursus dan administrasi klien (siswa belajar) bergantung pada pemahaman yang mereka buat sebelum memulai persiapan.

Pemahaman dibuat tertulis yang dicetak sebagai struktur pendaftaran kursus. Struktur pendaftaran berisi kesepakatan yang dibuat oleh salah satu pertemuan, khususnya pembentukan organisasi spesialis kursus. Klien administrasi kursus tidak memiliki posisi untuk memutuskan item dalam pemahaman. Item dalam struktur pendaftaran adalah sebagai berikut:

- a) Kepribadian klien administrasi jelas terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, orientasi, lokasi pengajaran, bundel,
- b) Berapa angsuran jelas biaya pendaftaran,
- c) Rundown jelas jenis kendaraan. Selain itu, ini juga mencakup berbagai jenis kendaraan yang jelas harus dipilih oleh klien bantuan,
- d) Biaya Pendaftaran yang berubah sesuai dengan jenis kendaraan yang dipilih jurusan,
- e) Rundown persiapan pilihan waktu.

Mengingat pengaturan dalam struktur pendaftaran, pendirian organisasi spesialis memiliki komitmen yang menyertainya:

- a) Berikan jenis kendaraan yang jelas dipilih oleh klien pendamping (siswa belajar) pada struktur pendaftaran.
- b) Cantumkan titik waktu (hari dan jam) persiapan yang dipilih oleh klien pendamping (siswa belajar) pada struktur pendaftaran

- c) Memberikan satu guru mata kuliah untuk membantu klien administrasi (mahasiswa pengganti) selama persiapan.

3.2. Hubungan Hukum Antara Yayasan Penyedia Jasa Kursus Mengemudi Mobil Dan Pengguna Jasa Kursus

Dalam perkumpulan dan pelaksanaan latihan bisnis organisasi yang memberikan keuntungan bagi kursus mengemudi kendaraan, ketua tidak langsung mengkoordinir klien organisasi kursus, melainkan memilih penghibur kegiatan, yang untuk situasi ini adalah tenaga kerja. Buruh di kursus mengemudi kendaraan disebut guru.

Untuk keadaan saat ini, tidak ada hubungan substansial antara guru dan klien organisasi kursus. Tidak ada hubungan sah yang mengikat keduanya. Oleh karena itu, jika terjadi kecelakaan, klien bantuan tidak memiliki hak istimewa untuk menuntut pendidik.

Karena kursus mengemudi kendaraan, hubungan sejati antara asosiasi ahli dan pendidik adalah hubungan yang bekerja dengan pemahaman pekerjaan yang dilakukan oleh kedua pemain. Untuk keadaan sekarang ini, persetujuan ahli berjalan sebagai bisnis atau kepala dan guru sebagai pekerjaan.

Dalam Pasal 1 Angka 14 Peraturan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penyediaan Tenaga Kerja, diatur bahwa: "Pengertian Bisnis adalah pemahaman antara seorang spesialis/pekerja dan seorang pebisnis atau manajer yang memuat syarat-syarat kerja, hak-hak istimewa dan komitmen pertemuan".

Dengan demikian pengertian kerja harus memuat syarat-syarat kerja, kebebasan dan komitmen berserikat, lebih khusus pendirian pemberi manfaat kursus mengemudi kendaraan yang kedudukannya sebagai pengusaha/bos dan pendidik kursus yang kedudukannya sebagai tenaga kerja. .

Hal-hal dalam kontrak bisnis sehubungan dengan kewajiban dan kewajiban guru adalah sebagai berikut:

- a) Menginstruksikan, menginstruksikan dan mempersiapkan warga untuk maju serta dapat diharapkan dan bertanggung jawab atas sistem pertunjukan belajar kursus mengemudi kendaraan
- b) Menyerahkan dan mematuhi Anggaran Dasar (Promosi) dan Peraturan Perundang-undangan (Kerajinan) dan pengaturan yang berbeda yang diberikan oleh pendirian/pengelola langsung.
- c) Bertanggung jawab untuk sarana belajar tanpa henti selama pembelajaran dan pengalaman pendidikan.
- d) Cobalah untuk tidak memanfaatkan sarana pembelajaran secara nyata dan proaktif dalam setiap tindakan organisasi.
- e) Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan kendaraan belajar
- f) Dalam hal Anda lalai dalam menjalankan kewajiban Anda, maka segala akibat dan bahaya yang ditimbulkan adalah kewajiban moral Anda. Segala pertaruhan kemalangan yang ditimbulkan pada kendaraan bersama karena kecerobohan dalam menggunakannya menjadi tanggung jawab penuh pendidik.

Dalam kontrak bisnis antara guru dan perusahaan yang memberikan contoh mengemudi kendaraan, hanya komitmen

yang harus dipenuhi oleh pendidik dicatat. Tidak masuk akal bagaimana kebebasan pendidik sebagai tenaga ahli maupun sebaliknya adalah hak dan kewajiban lembaga penyelenggara kursus mengemudi kendaraan. Jelasnya, sejauh substansi pengaturan kerja dibuat oleh lembaga pemberian administrasi kursus mengemudi kendaraan. Tidak fokus pada prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Mengingat butir-butir dalam perjanjian tersebut, tentu sangat menyulitkan bagi pendidik. Dalam pasal-pasal dalam kontrak kerja, jelas bahwa lembaga pemberi kursus mengemudi kendaraan memberikan tanggung jawab penuh kepada guru.

3.3. Tanggung Jawab Yayasan Penyedia Jasa Kursus Mengemudi Mobil Terhadap Pengguna Jasa Apabila Terjadi Kecelakaan Pada Saat Pelatihan

Berdasarkan hasil eksplorasi yang dilakukan penciptanya, dalam pelaksanaan kelas pembelajaran mengemudi kendaraan ini, sering terjadi kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan yang terjadi pada saat persiapan adalah bertabrakan dengan kendaraan pengguna jalan lain dan hal ini membahayakan kendaraan kursus dan kendaraan pengguna jalan lainnya serta sebaliknya.

Pembuatnya memimpin wawancara penelitian dengan 6 klien yang jelas mendapat manfaat (siswa memahami) mengendarai mobil dan 2 di antaranya mengalami kecelakaan saat mempersiapkan.

Tabel 1.

Klien Administrasi (mahasiswa program studi) Yang Mengalami Kecelakaan Saat Persiapan.

No.	Kategori	Jawaban Pengguna Jasa	Persen (%)
1	Pernah	2	40%
2	Tidak	4	60%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Primer, Diolah 2021

Berdasarkan informasi pada tabel 1, ternyata 2 klien penyelenggara kursus (40%) mengemudikan kendaraan mengalami kecelakaan saat persiapan dan ada 4 klien penyelenggara kursus (60%) yang tidak pernah mengalami kecelakaan selama persiapan. Dua klien pendamping yang mengalami kecelakaan tersebut adalah klien administrasi kursus ALIAH.

Kecelakaan ini tidak hanya membuat malapetaka kendaraan kursus yang memiliki tempat dengan pendirian organisasi spesialis kursus tetapi juga merugikan klien bantuan dan perkumpulan yang berbeda (klien kendaraan yang berbeda), seperti terlihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.

Jenis Kemalangan yang Ditimbulkan oleh Kecelakaan Selama Persiapan

No.	Bentuk Kerugian	Jawaban pengguna jasa	Persentase (%)
1	Kerugian fisik terhadap pengguna jasa	-	0 %
2	Kerusakan pada mobil Kursus	2	50%
3	Kerusakan pada mobil pengguna kendaraan Lain	2	50%
Jumlah		4	100 %

Sumber: Data Primer, Diolah 2021

Berdasarkan keterangan pada tabel 2, ternyata 2 klien penolong (setengah) mengalami kecelakaan dan jenis kemalangan membahayakan kendaraan kursus dan 2 klien pendamping (setengah) mengalami kecelakaan dan jenis kemalangan membahayakan kendaraan klien jalanan lainnya. .

Penyebab kecelakaan biasanya karena kecerobohan pendidik saat pergi dengan klien administrasi (siswa kursus), kecerobohan klien administrasi (siswa siswa) karena situasi ini tidak fokus pada pedoman atau perintah dari guru saat mengemudikan kendaraan kursus dan Selanjutnya klien kendaraan lain yang menabrak kendaraan lintasan di lintasan. jalan tol.

Mengingat akibat dari pertemuan dengan klien administrasi (siswa belajar) di atas, di antaranya ada 2 klien pembantu (siswa mengingat) yang mengalami kecelakaan selama persiapan, yang mampu di sekitar kemudian adalah pendidik. Guru membayar biaya perbaikan kendaraan kursus dan selanjutnya membayar perawatan kendaraan klien kendaraan lain yang sekitar kemudian dirugikan karena tertabrak kendaraan kursus.

Kewajiban pendirian organisasi spesialis kursus mengemudi kendaraan ALIAH adalah sebagai suatu badan hukum yang sah, sehingga kewajiban pengurusan dan pelaksanaannya tergantung pada Peraturan Pendirian. Sejauh mengawasi dan melaksanakan pelaksanaan pendirian, dalam menyelesaikan kegiatan yang sah, administrasi pendirian disetujui untuk menangani pendirian.

Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pendirian mengatur bahwa administrasi adalah organ pendirian yang melengkapi administrasi pendirian. Badan pengurus yang disertai tugas mengurus pendirian, bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendirian untuk kepentingan dan tujuan pendirian serta mengurus pendirian di luar atau di dalam pengadilan.

Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pendirian menetapkan bahwa pengurus bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendirian untuk kepentingan dan tujuan pendirian dan mempunyai hak istimewa untuk mengurus pendirian di dalam dan di luar pengadilan. Selain itu, Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pendirian menetapkan bahwa setiap administrasi menjalankan kewajibannya dengan tulus dan penuh tanggung jawab mengenai kepentingan dan tujuan pendirian.

Kewajiban suatu badan usaha yang memberikan manfaat kursus mengemudi kendaraan timbul karena adanya suatu perikatan yang sah yang dibantu oleh badan usaha tersebut melalui organ-organnya atau pengurus badan usaha tersebut. Dalam pengaturan yang berbeda, ditegaskan bahwa setiap organ pendirian tidak bertanggung jawab atas kegiatan yang sah dari pendirian yang dilakukannya, kecuali jika:

Terbukti bahwa akibat kecerobohannya aksi unjuk rasa tersebut membuat malapetaka bagi keamanan. Peraturan Pendirian hanya menempatkan kewajiban pada administrasi dan pengelola. Beberapa pasal yang mengatur tentang tanggung jawab organ pendirian dapat ditelaah bahwa ada kewajiban yang diselesaikan bersama antara organ dan lembaga, ada yang dilakukan bersama antar organ, dan ada kewajiban yang diselesaikan secara mandiri.

Rencana permainan tanggung jawab bersama antara organ dan pembentukan yang sebenarnya dapat dibaca dalam beberapa pasal Peraturan Pendirian. Salah satunya menggarisbawahi bahwa jika likuidasi terjadi karena kekurangan atau kecerobohan administrasi dan sumber daya pembentukan tidak cukup untuk menutupi kemalangan karena pasal 11, setiap orang dari administrasi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kemalangan, kecuali jika mereka dapat menunjukkan bahwa kepailitan itu bukan karena masalah atau kecerobohan mereka, kemudian, pada saat itu, melepaskan kewajiban yang seharusnya ditanggung atau tanggung jawab perseorangan, cenderung diteliti dalam Pasal 35 Ayat 5 Peraturan Pendirian yang menyebutkan bahwa

setiap administrasi mampu sepenuhnya dengan dan dengan menganggap orang yang bersangkutan dalam melakukan kewajibannya tidak mengikuti pengaturan anggaran dasar, membawa tentang kemalangan untuk pembentukan dan orang luar.

Kegiatan subyek hukum dapat berupa kegiatan yang sah dan bukan kegiatan yang halal. Kegiatan yang sah dapat muncul dari pengaturan, sementara demonstrasi yang tidak sah muncul dari peraturan. Setiap orang dalam organ pendirian tidak bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang sah dari lembaga tersebut, kecuali jika terbukti karena kecerobohan demonstrasi tersebut telah merugikan lembaga atau pihak luar. Oleh karena itu, jika organ pendirian itu secara sah telah menyelesaikan kegiatan-kegiatan tertentu dalam situasinya sebagai organ pendirian, karena tidak dalam kerangka pemikiran itu secara pribadi, maka organ tersebut telah bergerak untuk dan untuk manfaat badan usaha, jadi kegiatan untuk dan untuk usaha, selanjutnya menjadi kegiatan perseroan.

Mempertimbangkan pengaturan mengenai masalah tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Pendirian, sangat jelas bahwa lembaga yang memberikan penyelenggaraan kursus ini harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada lembaga dan pihak luar (siswa yang belajar).

Dengan demikian, jenis kewajiban perusahaan yang memberikan manfaat kursus mengemudi kendaraan jika terjadi kecelakaan selama persiapan yang kemudian, pada saat itu, menyebabkan kerugian selama persiapan kursus mengemudi kendaraan adalah memberikan pembayaran sebagai biaya tetap untuk kendaraan dan biaya klinis. biaya untuk kemalangan yang sebenarnya dialami oleh pengemudi. klien administrasi (siswa menyadari) yang jelas tergantung pada Peraturan Pendirian untuk situasi ini kewajiban pendirian dengan tidak diizinkan untuk memaksakan tanggung jawab pada guru untuk situasi ini sebagai pekerjaan.

Sangat jelas mengingat peraturan pendirian, kewajiban mengenai administrasi dan pelaksanaan latihan-latihan pendirian, kekuasaan administrasi untuk menangani pendirian sepenuhnya sadar sebagai lawan untuk menunjuk tanggung jawab kepada agen latihan untuk situasi ini yang dilakukan oleh angkatan kerja. latihan bisnis pendirian di lapangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kewajiban perusahaan untuk memberikan administrasi kursus mengemudi untuk mendukung klien (belajar belajar) jika terjadi kecelakaan selama persiapan adalah bahwa pelanggan tidak menanggung risiko kerugian properti perusahaan. Kewajiban pendirian organisasi spesialis kursus mengemudi memberikan tanggung jawab penuh kepada pendidik. Jenis tanggung jawab guru meliputi kewajiban untuk menafkahi klien dan kewajiban terhadap korban jika terjadi kemalangan karena kecelakaan selama persiapan, kewajiban pendidik adalah membayar kerugian kendaraan, misalnya membawanya ke studio atau dipotong gaji lurus dengan pendirian yang memberikan manfaat kursus, kewajiban tetap dipikul oleh pendidik oleh koperasi spesialis.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan mengingat penemuan eksplorasi, pencipta mengusulkan hal-hal berikut: sebuah. Sesuai ulasan ini, pendirian yang memberikan manfaat kursus mengemudi lebih berfokus pada orang-orang yang mampu jika terjadi kecelakaan di jalan raya dan orang luar, khususnya kemalangan yang mungkin terjadi untuk mendukung klien, lebih dibutuhkan. Instansi yang memberikan manfaat kursus mengemudi perlu lebih menitikberatkan pada kebebasan guru sebagai buruh di bawah regulasi SDM, bukan hanya menonjolkan komitmen dan kewajiban yang umumnya akan menyusahkan para pendidik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Haris, 2005. Urgensi Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia. Universitas Hasanuddin Makassar: tesis program pascasarjana.
- Ahmadi, Miru. 2008. Hukum Kontrak Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi, Miru, 2011. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, Miru & Sakka Pati. 2011. Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 Bw). Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2005. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia
- Anwar, Borahima. 2010. Kedudukan Yayasan Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Ari Kristin Prasetyoningrum, 2015. Risiko Bank Syariah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, S.H, Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang -Undang RI No. 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan, Indonesia Center Publishing
- Armen Yasir, 2007, Hukum Perundang-Undangan, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Celine Tri Siwi Kristanti, 2014. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika
- Celine Tri Siwi Kristanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika
- Chatamarasjid Ais. 2002. Badan Hukum Yayasan .Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Chaidir Ali. SH, 1997. Badan Hukum. Bandung: Alumni.
- Hamid, A. H., & SH, M. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Handri raharjo. 2009. Hukum Perjanjian Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hoffman. sebagaimana dikutip dari R. Setiawan. 1999. Pokok-Pokok Hukum Perikatan
- Mariam, Darus Badruzaman. 2006. KUH Perdata Buku III. Bandung: Alumni.
- M. Marwan dan Jimmy. P, 2009, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher
- M. Sadar, Taufik Makarao, Habloel 2012 Mawardi. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta: Citra Aditya.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. 2010. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: Rajawali Pers.

- Purbacaraka, 2010, Perihal Kaedah Hukum, Bandung, Citra Aditya, hlm.
- R. Soeroso, 2001. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,
- Rido, Ali. 2004. Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung: P.T. Alumni
- Rudhi, Prasetya. 2012. Yayasan Dalam Teori Dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Subekti, 2005. Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermedia,
- Sudikno Mertokusumo, 1993. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, 2013 Islamic Risk Management For Islamic Bank, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Yohanes Sogar Simamora. 2012. Karakteristik, Pengelolaan Dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding. Volume 1. Surabaya: Unair Pres
- Yusuf Shofie. 2011. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Grafika.
- Zulham, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group